

Usaha Politik Hindia Belanda Terhadap Arus Perlawanan Umat Islam (Studi Jabatan Mufti di Hulu Sungai)

Nuril Khasyi'in*¹, Alfianoor²,

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, ²Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
e-mail: *1nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id, 2alfigenk85@gmail.com.

Diterima 0-12-2022 | Direview 10-12-2022 | Diterbitkan 30-12-2022

Abstract. *This paper discusses the political movement of the Dutch East Indies in Hulu Sungai by looking at the position of the mufti as an important position used by the Dutch East Indies government against the resistance of Muslim movements. Although the Dutch East Indies government at that time was considered the owner of the rightful government. However, the resistance movements against this government continued to the roots of the lower classes of society. This paper aims to find out what the Dutch East Indies political efforts and steps were in resisting the massive movements of the Hulu Sungai community. Mufti became the center issue to create government stability. This study uses historical research methods by looking at historical data as a source of information. In this study it was found, that the Dutch East Indies used two forms of political resistance against Muslim movements, namely; soft political power and hard political power. Hard political power can be seen from the forcible arrest of parties who are considered rebellious. Meanwhile, soft political power is formed by forming and appointing the mufti to become a mediator and stabilizer in the community.*

Keywords: *Dutch East Indies Politics, Muslims and Mufti Position.*

Pendahuluan

Hulu Sungai terletak di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Wilayah *lawas* yang mempunyai sejarah panjang dan pengaruh di seluruh pulau Kalimantan. Sebagai pusat kekuatan politik yang bisa dilihat dari munculnya dua kerajaan besar yang melegenda, yaitu kerajaan Dipa dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Daha. Dua kerajaan ini mewarisi legitimasi Majapahit dalam memperkuat dan memperluas daerah kekuasaannya pada sebagian besar daerah yang ada di pulau Kalimantan.¹

Munculnya kekuatan Islam di Pulau Jawa, dengan berdirinya Kesultanan Demak pada abad ke-16 mempengaruhi kondisi stabilitas politik Kerajaan Daha. Dengan bantuan Demak, Raden Samudera seorang Pangeran Daha yang memberontak berhasil mendesak Pangeran Tumenggung Raja Daha terakhir ke wilayah Alai. Meski mereka gagal menghancurkan pasukan Daha, pertemuan berakhir dengan perdamaian, Pangeran Tumenggung bersedia mengalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Samudera. Sebagai bagian dari perdamaian tersebut Pangeran Tumenggung mendapatkan wilayah tersendiri di Sungai Alai, meliputi Sungai-sungai yang bermuara di Danau Bangkai atau wilayah yang hari ini disebut Pahuluan.² Perdamaian tersebut membantu Raden samudera menstabilkan kerajaan baru di daerah selatan dekat muara Sungai Barito yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Banjar.³ Sebagai bagian dari

¹Hasanah, *Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Banjar (Abad ke-18)*, (2016), p. 1-14.

²Wisnu, Subroto, "Power Shift and Socio-Political Changes on Banjarmasin in 19th-20th Century". *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 12.2 (2018), p. 120-127.

³Azmi, Muhammad, "Islam di Kalimantan Selatan pada Abad Ke-15 sampai Abad ke-17", *Yupa: Historical Studies Journal* 1.1 (2017) p. 38-47.

perjanjian dengan Demak, Kerajaan Banjar menepati janjinya menjadikan Islam sebagai agama resmi Kerajaan.

Sejak saat itu Hulu Sungai tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, meskipun demikian sisa-sisa kejayaan selama berabad-abad ini tidaklah sirna. Hulu Sungai tetap menjadi pusat budaya dan politik dengan sumber daya utama, baik sumber daya manusia maupun alam. Dan termasuk sebagai pusat ke-Islaman dikawasan tersebut.

Tiga ratus tahun kemudian Kesultanan Banjar yang telah menjadi *vasal* dari kerajaan Belanda dibubarkan sepihak oleh kerajaan Belanda. Hulu Sungai kembali menjadi perhatian, karena menjadi salah satu pusat peperangan utama pada perang Banjar dari tahun 1859-1905.⁴ Situasi politik di wilayah yang diperintah oleh kesultanan yang cukup rumit, akibat pertikaian di Hulu Sungai antara Tumenggung Jalil dan Adipati Danureja, dan kasak-kusuk masalah legalitas suksesi sultan Tamjidillah yang dianggap menyalahi wasiat Sultan Adam. Puncaknya dimulai dengan penyerangan gerakan Panembahan Aling terhadap Benteng Pengaron sebagai tempat pertambangan Batubara dibawah Perusahaan (Korporasi) Pemerintahan Belanda dan Kesultanan Banjar pada tahun 1859.⁵ Untuk merespon gejolak politik yang ada, Pemerintahan Belanda kemudian meminta sultan Tamjidillah untuk mundur sebagai sultan pada juni 1859, karena dianggap sudah tidak efektif dan gagal dalam menyelesaikan banyak permasalahan di wilayah kesultanan Banjar. Selain itu, mangkubumi yang dijabat pangeran Hidayatullah yagn sedangberada di Amuntai juga menolak pulang ke Martapura. Maka dengan penolakan tersebut tepat pada tanggal 11 juni 1860 kesultanan Banjar resmi dihapuskan oleh Belanda.⁶

Awal mula penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan masih berupa misteri. Sejauh yang diketahui kronologisnya tidak lepas dari problem perebutan tahta di kalangan kesultanan Banjar. Setelah pemberontakan pangeran Amir, sultan Banjar menawarkan kesultanan Banjar menjadi vasal kerajaan Belanda dengan kompensasi tertentu, tawaran tersebut meski awalnya tidak diminati oleh gubernur Jenderal VOC, karena kompensasi yang diminta sultan Banjar terlalu besar dan dianggap akan merugikan VOC, namun setahun kemudian tawaran tersebut disetujui dan kontrakpun ditanda tangani tahun 1787.⁷

Dengan dibubarkannya kesultanan banjar, pemerintahan Belanda kemudian membentuk pemerintahan baru di daerah bekas wilayah kesultanan Banjar, termasuk disana wilayah bekas Kesultanan Banjar yang dibagi menjadi dua afdeling, yaitu Afdeling Martapura dengan ibukota di Martapura dan afdeling Hulu Sungai dengan ibukota di Amuntai, ditambah dengan Afdeling terdahulu di daerah yang sebelumnya diperintah oleh Pemerintah Belanda yaitu afdeling Kuin di Banjarmasin, maka total ada tiga Afdeling. Setiap afdeling dipimpin oleh seorang pemimpin pribumi dengan jabatan regent atau bupati dan seorang mufti, tiap afdeling membawahi beberapa Onderafdeling yang dipimpin oleh seorang kiai Demang dan Penghulu.⁸

⁴Ariawan, Andrian Kiky, and M. Th. "*Martir di Awal Tabun.*", lihat pula Helius Sjamsudin, "*Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*", (Balai Pustaka, 2001).

⁵Helius Sjamsudin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*, (Balai Pustaka, 2001), p.155-220.

⁶Ibid, p. 175-184.

⁷J.C Noorlander, *Bandjarmasin En De Compagnie In De Tweede Helft Der 18df Eeuw*, (Gedrukt Te Leiden Bij M. Dubbledeman, 1935), P. 143.

⁸"*Almanak Van Nederlandsch indie Voor Het Jaar Vol 34*", (Lands Durkkery 1861), p.130.

- **Hulu Sungai dan Kekuasaan**

Hulu Sungai menjadi wilayah dengan penduduk terpadat di pulau Kalimantan pada abad ke 19⁹, dengan basis penduduk paling banyak di wilayah Kalimantan Selatan dengan persentase penduduk muslim mayoritas. Menurut Goh Yoon Fong ada tiga kekuatan politik di awal tahun 1700an, *Pertama*, Martapura, dimana Sultan Banjar berada, seorang Panglima perang bernama Pangeran Purba menjadi sangat berpengaruh. *Kedua*, wilayah bakumpai, Margasari dan Negara yang dipimpin oleh Pangeran Anom yang bergelar Sultan Negara. Dan wilayah Alai yang dipimpin oleh Tumenggung Gusti.¹⁰ Terlihat Hulu Sungai terbagi dalam dua kekuatan politik yang dibagi menjadi dua wilayah, dan kemudian terkenal dengan sebutan **“Banua Lima”** yang terdiri dari: Nagara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai,PKalua, dan wilayah pahuluan di pedalaman Sungai Alai Besar yang terdiri dari daerah Batang Amandit dan Batang Alai Kecil, Batang Labuan Amas dimana semua sungai bermuara di Danau Bangkau.

Daerah Pahuluan adalah wilayah yang dikuasai oleh keturunan raja Daha Pangeran Tumenggung. Pada tahun 1726 terdapat laporan mengenai Kerajaan Jatuh di Alai yang tiada lain adalah wilayah yang disebut dengan Pahuluan.¹¹ Pembagian daerah ini bisa kita runut lagi dari perjanjian perdamaian pada masa awal berdirinya kesultanan Banjar, dimana Pangeran Tumenggung mendapatkan daerah kekuasaan di Alai.¹² sedangkan daerah Banua Lima menjadi daerah penyangga antara Alai dan Banjar yang mempunyai trah kekuasaan berbeda.

Tahun 1860 Hulu Sungai dijadikanlah afdeling yang dipimpin oleh seorang regent dan diwakili oleh seorang Mufti, pada saat itu yang dipilih adalah mantan Tumenggung Banua Lima yaitu Raden Adipati Danureja dan Mufti Muhammad taib . Keunikan pada Afdeling di wilayah Kalimantan Selatan adalah mempunyai daerah bawahan yang disebut dengan Onderafdeeling setingkat kecamatan dipimpin oleh seorang demang dan diwakili oleh seorang penghulu. Seperti umumnya wilayah kabupaten di Hindia Belanda lain, seorang Adipati biasanya didampingi seorang Kontroler Belanda. Secara resmi, dalam struktur pemerintahan masih dipimpin oleh seorang pribumi, namun pada kenyataannya masih dikontrol dibawah pengawasan kontrol Belanda.

- **Gerakan Islam di Hulu Sungai**

Hulu Sungai yang dahulu menjadi ibukota kerajaan Dipa dan Daha telah lama di datangi oleh orang-orang Islam. Seorang pedagang Islam dari Surabaya datang ke negara Dipa, dan kemudian membawa seorang Pangeran Dipa yang bernama Sekar Sungsang. Dia kemudian berlayar pulang menuju Surabaya. Sekar Sungsang menjadi seorang muslim, dan kemudian pulang ke Hulu Sungai dan berhasil membangun kerajaan Daha setelah berhasil mengambil tahta Kerajaan Dipa, hikayat ini cukup nyaman diterima ketika kerajaan Dipa sebagai pusat kerajaan

⁹ Hawkins, Mary. "Becoming Banjar: Identity and Ethnicity in South Kalimantan, Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 1.1 (2000), p. 24-36.

¹⁰Goh Yoon Fong, *Trade and Politics In Banjarmasin 1700-1747*, Phd, thesis, (University of London, 1969), p. 119.

¹¹Francois Valentyn, *Verhandeling Der Zee Horenkens En Zee Gewassen in En omtresnt Amboina En De naby Gelege Eylanden, mitsgader Een Nauwkeurige Beschryving Van Banda*, (Jonnes Van braam Gerard Onder de linden 1726) p. 236.

¹²A. A. Cense, *De kroniek van Bandjarmasin*, (C.A. Mees, Santpoort 1928) p. 44.

besar di zamannya didatangi oleh para diplomat, pengelana dan pedagang berbagai bangsa, negara maupun agama termasuk orang-orang muslim.¹³ Jika Raden sekar Sungsang adalah seorang muslim, maka bisa dikatakan pendirian kerajaan Daha adalah pergerakan Islam pertama di Kalimantan Selatan.¹⁴

Gerakan Islam berikutnya terjadi di Hulu Sungai saat penyerangan pangeran Samudera ke Hulu Sungai yang didukung oleh orang Islam di pesisir dan kesultanan Demak di Pulau Jawa, gerakan Islam ini berhasil mengalahkan kerajaan Daha dan mendirikan kesultanan Banjar yang mendeklarasikan diri sebagai kerajaan Islam.¹⁵ Dari sana lah gelombang islamisasi terus memasuki Hulu Sungai. Sebuah laporan penelitian arkeologis menyebutkan ada empat tiang masjid keramat Palajau yang sudah berumur lebih dari 500 tahun. Ini menunjukkan, bahwa masjid tersebut cukup sangat tua¹⁶. Laporan lainnya, yaitu perjalanan de Roy di tahun 1691 ke pulau Kalimantan yang terbit tahun 1726 menyebutkan terkait jumlah penduduk muslim yang ada di beberapa kota di Hulu Sungai, dari Margasari, Nagara, Alai, Alabio, Amuntai dan Kalua.¹⁷

Gerakan Islam berikutnya terjadi dipertengahan abad ke 19, ketika beberapa gerakan umat Islam muncul sebagai kekuatan politik dan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Akhir tahun 1959 umat Islam Amuntai dipimpin oleh para haji dan penghulu menahan pangeran Hidayat agar tidak pulang ke Banjarmasin. Mereka berani menghalangi utusan Belanda untuk mengajak dan menjemput pangeran Hidayat untuk pulang ke Banjarmasin.¹⁸ beberapa gerakan Islam lainnya bahkan melawan dengan senjata, seperti gerakan Muning di Tambai Mekkah dan gerakan *Beratip Baamal*.¹⁹

Perlawanan masyarakat Islam di Amuntai terhadap pemerintahan Belanda merupakan bentuk respon terhadap penjajah Belanda yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan kesultanan, khususnya dalam suksesi pemilihan tahta setelah Sultan Adam meninggal dunia.²⁰ Gerakan simbolik tersebut menjadi gerakan umat Islam pertama yang diketahui melawan Belanda dalam masa 80 tahun penjajahan semenjak tahun penyerahan kedaulatan Banjar tahun 1787. Gerakan Muning di tambai Makkah dekat Lawahan dipimpin Panembahan Aling juga dianggap sebagai gerakan religius politik dengan legitimasi mistik Islam, gerakan tersebut bahkan melakukan aksi yang lebih progresif dengan wacana restorasi kesultanan Banjar yang dianggap telah rusak dan melakukan perlawanan bersenjata dengan melakukan penyerangan benteng Orange Nassau di pengaron.²¹ Sedangkan gerakan Beratip beamal tidak memberikan kejelasan motivasi mereka terhadap politik, meski kecenderungan mereka untuk mendukung trah Pangeran Antasari berupa gerakan paling fanatik, aktif, brutal, dan berani mati.

¹³Ibid, p. 31.

¹⁴Adi Teruna Effendi, *Jejak Islam di Nusantara*, (IPB Press, Bogor, 2019) p. 224.

¹⁵M. Suriansyah Ideham, *Sejarah Banjar* (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2007) p. 95.

¹⁶Hartatik, “Keberlanjutan Budaya Palajau”, *Jurnal Kindai Etam*, Volume 1, Number 1, 2015 (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Balai Arkeologi Banjarmasin), p.19-48.

¹⁷*Hachelijke Reys-Togt Jacob Jansz De Roy, Borneo En Atchin*, (Lieden, Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1706), p.126.

¹⁸Kielstra, E. B, “*De ondergang van het Bandjermasinsche rijk*” (Leiden: E.J. Brill, 1892), p.204.

¹⁹M. Suriansyah Ideham, *Sejarah Banjar*, p. 260, 300.

²⁰Kielstra, E.B, “*De ondergang van het Bandjermasinsche rijk*” p.204.

²¹Helius Sjamsudin, “*Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*”, (Balai Pustaka, 2001), p.137.

Pada fase berikutnya, perlawanan bersenjata terhadap Belanda tidak hanya dilakukan oleh gerakan Islam, tapi juga oleh kelompok istana, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Antasari dan keturunannya di wilayah Hulu Barito dengan bekerjasama dengan Bangsawan terkenal Tumenggung Surapati.²² Begitu pula dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pangeran Hidayatullah dengan panglimanya Demang Lehman. Mereka melakukan kampanye di Hulu Sungai sambil bekerjasama dengan beberapa bangsawan Hulu Sungai yang mendukung mereka.²³

Kondisi ini, membuat Belanda terus menghadapi serangan dan tekanan dari semua kelompok secara bersamaan dan Belanda melakukan politik keras dengan melancarkan serangan militer terhadap musuh-musuhnya. Gerakan tambai Mekah dimuning adalah yang pertama dihancurkan oleh Belanda. Seiring waktu, seluruh perlawanan telah berhasil diredam Belanda, baik dengan mengalahkan mereka dalam pertempuran ataupun merangkul mereka dengan kompensasi tertentu. Dibuangnya Pangeran Hidayatullah ke Cianjur dan dihukum matinya Demang Lehman adalah kemenangan kedua dari Belanda, dan ini berhasil mengurangi perlawanan bangsawan di Hulu Sungai.

Hanya gerakan Beratip beamal yang masih terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, gerakan ini akhirnya dianggap sebagai suatu ancaman besar terhadap otoritas Belanda melakukan penindasan keras terhadap mereka semenjak tahun 1861, namun ternyata gagal untuk dihancurkan.²⁴ Salah satu pertempuran monumental adalah pertempuran di kampung “Jatuh” antara 200 pasukan Beratif Baamal yang melawan 50 orang pasukan Belanda. Van der heyden melaporkan, bahwa pemimpin Beratif Baamal dalam pertempuran itu adalah seorang yang masih muda, berjubah kuning dan bersorban putih.²⁵

Pada pertengahan tahun 1865, penghulu Abdul Rasyid pendiri dan Pemimpin utama Beratip Beamal berkolaborasi dengan Tumenggung Naro dan membawa 200 orang pasukan mencoba menyerang benteng Barabai, namun berhasil digagalkan oleh pasukan Belanda. Semenjak itu, perburuan terhadap Penghulu Abdul Rasyid dilakukan, setelah perburuan berbulan-bulan yang dilakukan oleh Belanda dan pasukan kiai warga Kusuma kepala distrik Amuntai akhirnya Penghulu Abdul Rasyid tewas di Desa Habau Waringin pada tanggal 6 september 1865.²⁶ Kematian pemimpin Beratif Baamal ini, rupanya tidak menghancurkan sel-sel Beratip Beamal dan terus melakukan berbagai perlawanan dengan serangan-serangan sporadis terhadap Belanda hingga awal abad 20.²⁷

- **Jabatan Mufti dan Stabilisasi Politik di Hulu Sungai**

²²Helius Sjamsudin, “*Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*”, p. 235.

²³W. A. Van Rees, “*De Bandjermasinsche Krijg 1859-186*”³, (Arnhem, D. A. Thieme, 1865).

²⁴Helius Sjamsudin, “*Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*”, p. 277.

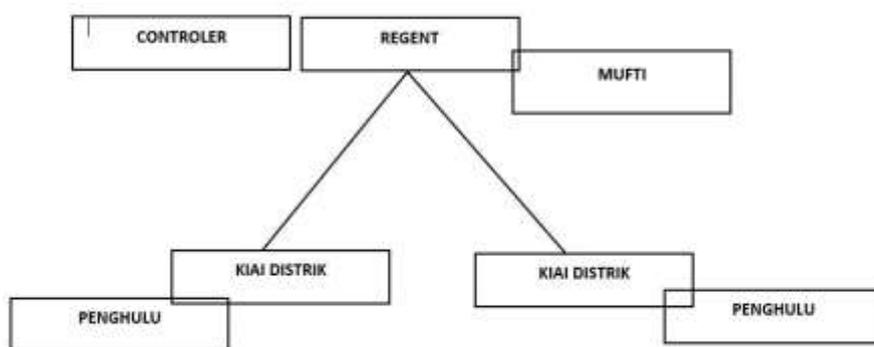
²⁵Winckel, L.F.A, *De militaire loopbaan van den Luitenant-Generaal Karel van der Heyden*, (H. Honig, 1896), p. 19.

²⁶H. Gr. J. L. Meyners. *Bijdragen Tot de kennis der geschiedenis Van het Bandjermasinsche rijk 1863-1866*, (Liedin, 1888), p. 304.

²⁷Helius Sjamsudin, “*Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*”, p. 276.

Pemerintah Belanda terlihat memberi ruang kepada para tokoh Islam untuk memberi penghargaan kepada pimpinan Islam atau yang disebut dengan *soft power political*. seperti tokoh bergelar haji, penghulu dan mufti. Seseorang yang bernama haji Isa menjadi pelobi utama dalam peristiwa penyerangan orang-orang Hulu Sungai di Martapura, dan cukup berhasil mencegah bentrokan. Begitu juga dengan Mufti Mahmud dan Penghulu Khalid yang berperan mendamaikan kedua belah pihak²⁸. Dalam peristiwa penahanan pangeran Hidayat di Amuntai, pemerintah Belanda mengirim seorang yang bernama Syarif Husin, seorang tokoh Islam Arab sebagai pelobi, Syarif Husin juga mengajak para haji dan penghulu dari distrik Nagara untuk ikut melobi ke Amuntai.²⁹

Pemerintahan baru yang dibentuk oleh Belanda setelah penghapusan kesultanan banjar juga melibatkan tokoh Islam. Umumnya ditanah gubernuran atau wilayah yang bawah administrasi pemerintahan Belanda seorang regent didampingi seorang penghulu, agak berbeda dengan regent di Kalimantan Selatan yang didampingi oleh seorang mufti. Pembentukan jabatan mufti dalam sistem pemerintahan kolonial tentunya merupakan suatu hal yang berbeda. Tahun 1860 Adipati Danuraja (menjabat 1860-1861) ditunjuk sebagai Adipati Hulu Sungai, sebelumnya beliau menjabat sebagai Tumenggung di Banua lima, dan mufti yang ditunjuk adalah mufti Muhammad Taib yang menjabat selama 6 tahun 1860-1866.³⁰ Mufti Muhammad Taib menjadi perhatian, karena ketika dimasa beliaulah peperangan di Hulu Sungai sedang berkecamuk dan ketika beliau turun jabatan, perang besar telah berhasil diredam.



Gambar 1: Struktur kedudukan mufti di pemerintahan Belanda

Jabatan penghulu memang umum dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, khususnya di wilayah-wilayah tanah gubernuran, namun jabatan mufti belum ada presedennya dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Situasi yang tidak stabil dikalimantan saat itu, dimana peperangan melibatkan umat Islam, mungkin menjadi pertimbangan utama Belanda untuk memasukkan jabatan mufti dalam pemerintahan.

Jabatan mufti bukan jabatan baru dalam masyarakat Kalimantan Selatan, dimasa pemerintahan Sultan Adam. Ada undang-undang yang diterbitkan, dan disebutkan jabatan mufti

²⁸ Helius Sjamsudin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*, p. 168-172.

²⁹Kielstra, E. B, “*De ondergang van het Bandjermasinsche rijk*”, p. 204.

³⁰H. Gr. J. L Meyners, “*Bijdragen Tot de kennis der geschiedenis Van het Bandjermasinsche rijk 1863-1866*”, p. 217. and “*Almanak Van Nederlandsch indie Voor Het Jaar Vol 34*”, (Lands Durkkery 1861).

menjadi tokoh penting dalam pemerintahan Sultan Adam dengan membawahi para penghulu dan lainnya. Melihat hal itu, bisa jadi keputusan Belanda mengangkat jabatan mufti tidak lepas dari taktik politik mengambil hati umat Islam dan stabilitas politik dengan tidak memaksakan sistem umum yang ada pada pemerintahan Belanda di Kalimantan Selatan.

Dalam struktur pemerintahan, mufti dibantu oleh para penghulu ditingkat distrik, wilayah setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang kiai. Maka mufti dan penghulu pada dasarnya ada dalam satu pemerintahan. Otoritas jabatan mufti jelas merupakan jabatan yang mengurus agama Islam yang utama diwilayahnya, sehingga umat Islam merasa terayomi dalam urusan-urusan Islam dan secara politik pula terwakili dalam pemerintahan.

Mufti tentu saja tidak selalu mengenai hal keagamaan, fungsi-fungsi politik juga dilaporkan dan disampaikan kepada mufti. Salah satu fungsi politik yang cukup penting adalah permintaan Belanda kepada para mufti dan penghulu untuk menekan kegiatan Baratip Baamal di masa-masa perang, para mufti dan penghulu juga diminta mengeluarkan fatwa yang menyudutkan Baratip Baamal sebagai pemberontak kepada pemerintah.³¹ Laporan lainnya, pada tahun 1861 mengenai permintaan pemimpin militer Belanda kepala penghulu untuk membantu relokasi rumah-rumah penduduk di desa Pamangkih yang dahulu terpencar tidak teratur lalu pindah ke pinggir jalan yang telah diatur oleh pemerintahan Belanda, pemindahan ini tidak terlepas agar pengawasan terhadap masyarakat mudah dilakukan oleh Belanda.³²

Dalam kasus lain juga terlihat, fungsi mufti yang diminta pendapatnya dalam sidang-sidang peradilan umum. Seperti kasus yang melibatkan seorang simpatisan Baratip Baamal pada sebuah laporan persidangan di tahun 1874 dalam kasus penyerangan seorang pribumi ke benteng Belanda di Amuntai. Serangan yang tiba-tiba di benteng amuntai melukai seorang tentara kulit putih yang kemudian tewas beberapa hari kemudian. Penyerangnya sendiri juga tewas dalam serangan tersebut, Belanda mencurigai penyerang tersebut berasal dari aliran tertentu karena dia telah memakai kain kafan dibalik bajunya, mengindikasikan dia telah siap mati untuk penyerangan hari itu. Pelaku dicurigai sebagai simpatisan Baratip Baamal, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam didapati bahwa penyerang tersebut berasal dari kampung Dangu di Barabai, pelaku memang belajar agama islam pada seseorang di Amuntai dan sering pergi berhari-hari meninggalkan keluarganya untuk itu.

Penyelidikan mengarah pada seseorang yang bernama haji Mataher di Amuntai sebagai mentor dari pelaku penyerangan, Haji mataher sendiri kemudian ditangkap. Meski Haji Mataher bersikeras mengatakan bahwa dia tidak terlibat, namun Jaksa tetap menuntut dia dengan hukuman mati. Dalam persidangan Kontroler merasa khawatir karena seorang mufti yang bernama Abdur Rauf yang dia sebut sebagai seorang yang sangat berpengaruh dengan jabatannya dan lama tinggal dan belajar di Mekkah. Menurut dia Mufti mempunyai hak memberi pendapat kepada Hakim. Jaksa merasa khawatir tuntutannya akan gagal karena pengaruh Mufti tersebut terhadap Hakim, tapi sungguh terkejut ketika Mufti tersebut memberikan pendapat bahwa, “dalam Islam tidak ada hukum (perintah) untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain”, sehingga

³¹H. Gr. J. L. Meyners. “*Bijdragen Tot de kennis der geschiedenis Van het Bandjermasinsche rijk 1863-1866*”, p. 298. and dr. W. R. Baron van hoevell “*Tijdschrift Voor Nederlandsch Indie. II*,” (Te Zalt-Bommel Bij Joh. Noman En Zoon 1868), p.189.

³²G. L. Tichelman, *Tijdschrift Van Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, (E.j.Brill. 1931), p. 471.

Hadji Mataher dijatuhi hukuman mati karena dianggap mempengaruhi seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dan orang lain.

Setelah dihukumnya Mataher situasi distrik Amuntai dilaporkan cukup stabil selama beberapa tahun berikutnya.³³ Mufti dalam peristiwa peradilan di atas memperlihatkan peran dan posisi penting mereka sebagai stabilitas diwilayahnya. Hingga seorang pejabat Belanda yang notabeni adalah penguasa utama, menghormati seorang mufti yang dianggapnya sangat berpengaruh.

Simpulan

Usaha perlawanan politik yang dilakukan Hindia Belanda secara umum terbagi menjadi dua; yaitu *hard political power* dan *soft political power*. Belanda melakukan *hard political power* terhadap gerakan-gerakan perlawanan seperti *ratih ba amal* yang notabene melakukan serangan dalam bentuk kekerasan. Penangkapan, penyiksaan dan eksekusi mati menjadi bentuk perlawanan Belanda. Sedangkan *soft political power* dilakukan dengan menjadikan jabatan (kedudukan mufti) menjadi stabilisator dan peredam konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Daftar Pustaka

Almanak, *Van Nederlandsch indie Voor Het Jaar Vol 34*, Lands Durkkery, 1861.

Ariawan, Andrian Kiky, and M. Th. "*Martir di Awal Tahun.*"

Azmi, Muhammad. "Islam di Kalimantan Selatan pada Abad Ke-15 sampai Abad Ke-17", *Yupa: Historical Studies Journal* 1.1 (2017)

Cense, A. A., *De kroniek van Bandjarmasin*, C.A. Mees, Santpoort 1928.

Effendi, Adi Teruna, *Jejak Islam di Nusantara*, IPB Press, Bogor, 2019.

Fong, Goh Yoon, "*trade and politics in banjarmasin 1700-1747*", Phd, thesis, University of London, 1969.

Hartatik, Keberlanjutan Budaya Palajau, "*Jurnal Kindai Etam*", Volume 1, Number 1, 2015.

(Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Balai Arkeologi Banjarmasin) 2015.

Hasanah, *Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Banjar (Abad ke-18)*, (2016).

Hawkins, Mary, "Becoming Banjar: Identity and Ethnicity in South Kalimantan, Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 1.1 (2000).

³³Munnick, O.M. de, *Mijn ambtelijk verleden, (1858-1894)*, (J.H. de Bussy 1912), p.60

- , -----, *Hachelijke reys-togt jacob jansz de roy, borneo en atchin*, Lieden, Pieter Vander Aa, Boekverkoper, 1706.
- Ideham, M suriansyah, *Sejarah Banjar*, Badan Penelitian Dan pengembangan Daerah provinsi Kalimantan Selatan, 2007.
- Kielstra, E. B, “*De ondergang van het Bandjermasinsche rijk*”, Leiden: E.J. Brill, 1892.
- Meyners ,H. Gr. J. L. “*Bijdragen Tot de kennis der geschiedenis Van het Bandjermasinsche rijk 1863-1866*”, Lieden, 1888.
- Munnick, O.M. de, “*Mijn Ambtelijk Verleden*”, (1858-1894), J.H. de Bussy 1912.
- Noorlander, J.C., “*Bandjarmasin - En De Compagnie In De Tweede Helft Der 18de Eeuw*”, Gedrukt te leiden bij M . Dubbledeeman, 1935.
- Winckel, L.F.A, “*De militaire loopbaan van den Luitenant-Generaal Karel van der Heyden*”, (H. Honig, 1896).
- Sjamsudin, Helius, “*Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti: Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1860*”, Balai Pustaka, 2001.
- Subroto, Wisnu. "Power Shift and Socio-Political Changes on Banjarmasin in 19th-20th Century." *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 12.2 (2018).
- Tichelman G. L., “*Tijdschrift van het koninklijk nederlandsch aardrijkskundig genootschap*” E.j.Brill. 1931.
- Van hoevell ,W. R. Baron, *Tijdschrift voor nederlandsche indie . II*, (Te Zalt-Bommel Bij Joh, Noman En Zoon, 1868.
- Van Rees, W. A., “*De Bandjermasinsche Krijg 1859 —1863*”, Arnhem, D. A. Theme, 1865.
- Valentyn, Francois, “*Verhandeling Der Zee Horekens En Zee Gewassen in En omtrent Amboina En De naby Gelege Eylanden, mitsgader Een Nauwkeurige Befchryving Van Banda*”, Jonnes Van braam Gerard Onder de linden 1726.